



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI JAWA TIMUR
15-19 FEBRUARI 2021**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI JAWA TIMUR
15-19 FEBRUARI 2021

I. PENDAHULUAN

1. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 3 Desember 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2021.
4. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI tanggal 2 Februari 2021 perihal Daerah Kunjungan Kerja Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

2. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur adalah melakukan

pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung serta menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, untuk tujuan:

a. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Melihat secara langsung kondisi pengelolaan Bank Sampah beserta kegiatannya di Kota Malang;
- Mendengar secara langsung sejauhmana pengurangan dan penanganan sarana prasarana sampah di Kota Malang dengan penerapan teknologi 3R (*reuse, reduce dan recycle*); serta
- Menyerap aspirasi dari masyarakat dan stakeholder dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Kota Malang.

b. Bidang Kelautan dan Perikanan

- Melihat secara langsung infrastruktur Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo dan infrastruktur Balai Karantina Perikanan, terutama layanan perizinan dan laboratorium;
- Mendengar secara langsung sejauhmana proses rekrutmennya, edukasinya, penelitiannya, aplikasinya dan pengabdian masyarakatnya dari Politeknik Sidoarjo, dan temuan penyelundupan dari jenis perikanan yang dilarang oleh Badan Karantina Ikan; serta
- Menyerap aspirasi dari stakeholder dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan, sarana prasarana Politeknik Sidoarjo, dan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di balai karantina perikanan.

c. Bidang Pertanian

- Meninjau secara langsung dan mendengarkan aspirasi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- Meninjau secara langsung produk-produk yang dihasilkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).
- Mendengarkan secara langsung kendala, permasalahan, capaian yang telah dilakukan oleh Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia *Holding Company* yang diwakili oleh PT Petrokimia Gresik
- Meninjau secara langsung perkembangan Kantor Karantina Pertanian Bandara Juanda Sidoarjo serta bertemu dengan eksportir hasil produk pertanian.

4. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Anggia Erma Rini, M.K.M., dengan susunan anggota tim sebagaimana terlampir.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 15-19 Februari 2021 bertempat di Kota Malang, Kab. Malang, dan Kab. Sidoarjo.

F. LOKASI YANG DITUJU

1. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
2. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).
3. Gudang Bulog Subdivre Malang.
4. Bank Sampah Kota Malang.
5. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
6. Kantor Karantina Pertanian Bandara Juanda Sidoarjo.
7. Kantor Karantina Perikanan Sidoarjo.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian dengan menyelenggarakan program vokasi dalam berbagai ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian. Polbangtan sendiri merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) yang bertujuan untuk meregenerasi tenaga terampil di bidang pertanian yang memiliki semangat wirausaha atau *socioagripreneur*. Model pembelajaran berbasis *Teaching Factory* (TEFA) menjadi pembeda dari lembaga sebelumnya, TEFA merupakan model pembelajaran dalam suasana yang sesungguhnya, dimana mahasiswa akan terbiasa bekerja, menumbuhkan jiwa *entrepreneur*.

Selain itu, juga merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian dengan menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing. Sebagai perguruan tinggi kedinasan, sarana dan prasarana yang tersedia di hampir seluruh Polbangtan hampir sama. Mahasiswa tinggal dan difasilitasi asrama, biaya perkuliahan juga ditanggung oleh Pemerintah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu usaha Pemerintah dalam mencetak generasi muda yang mau dan mampu untuk bekerja pada sektor pertanian. Polbangtan memiliki 3 program studi unggulan yaitu Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, serta Agribisnis Peternakan.

1. Profil Singkat Paparan

- Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan) merupakan salah satu Polbangtan dari 7 Polbangtan Nasional;
- Polbangtan hanya menerima mahasiswa dengan jumlah terbatas. 7 (tujuh) Politeknik yang dimiliki oleh BPPSDMP setiap tahunnya rata-rata menerima 1000 orang dan untuk Polbangtan setiap tahunnya rata-rata menerima 200 orang;
- Polbangtan merupakan pendidikan vokasi dengan 70% praktikum dan 30% merupakan teori;

- Mayoritas peserta didik merupakan anak petani dan diharapkan dapat meregenerasi petani lokal dengan memegang prinsip ekonomi (petani pengusaha/*job creator*);
- Biaya Operasional untuk Polbangtan (penyelenggaraan dan pemeliharaan) dalam 1 tahun membutuhkan anggaran lebih dari 1 Miliar;
- Penyelenggaraan pendidikan Polbangtan membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder khususnya Komisi IV DPR RI, baik berupa dukungan anggaran maupun program kerja;
- Animo masyarakat masuk ke Polbangtan sangat tinggi, Tahun 2020 pendaftar di Polbangtan sekitar 2000 peserta (yang diterima hanya 200 peserta);
- Mahasiswa di Polbangtan saat ini terdapat 915 mahasiswa dari 33 Provinsi. Polbangtan juga telah melakukan kerja sama dengan Pemda dan berbagai pihak yang menitipkan peserta didik ke Polbangtan; dan
- Selama Pandemi Covid-19, pelaksanaan pendidikan menggunakan *Landed Learning* (tidak sepenuhnya masuk Kampus dan dominan belajar di tempat masing-masing, tetapi untuk praktiknya bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* yang bergerak di bidang Industri dan Pemda). Polbangtan juga bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik dalam memberikan edukasi kepada mahasiswanya; dan
- Output dari Polbangtan (Alumni), dalam 2 tahun terakhir 10% menjadi ASN, 14% menjadi pegawai swasta, 15% menjadi wirausaha, sisanya tidak mendapatkan stimulan tetapi memiliki kompetensi penyuluhan dan lainnya. Kementerian Pertanian telah mengusulkan kepada MenPAN RB untuk merekrut calon-calon penyuluh yang akan datang karena memiliki kriteria yang disyaratkan.

2. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- Komisi IV DPR RI mengharapkan Politeknik Pembangunan Pertanian dapat menghasilkan SDM yang dapat menghasilkan dan mencukupi dirinya sendiri (enterpreneur/wirausaha);
- Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran untuk pengembangan Politeknik Pembangunan Pertanian seluruh Indonesia;

- Komisi IV DPR RI mendukung Politeknik Pembangunan Pertanian untuk tetap menjadi aset Kementerian Pertanian dan tidak beralih ke Kementerian lainnya;
- Dibutuhkan dukungan anggaran pengembangan SDM pertanian guna menghasilkan produk pertanian;
- Komisi IV DPR RI meminta Politeknik Pembangunan Pertanian untuk mempublikasikan ke seluruh Indonesia karena beberapa wilayah masih belum mendapatkan informasi terkait dengan Politeknik ini;
- Komisi IV DPR RI meminta Politeknik Pembangunan Pertanian dapat mengkaji kembali metode rekrutmen dengan tidak sepenuhnya menggunakan prinsip "bebas biaya"; dan
- Komisi IV DPR RI meminta Politeknik Pembangunan Pertanian bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pertanian daerah (praktik).

B. BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT (BALITTAS)

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) merupakan Balai Penelitian Nasional yang berkedudukan di Malang, dan merupakan salah satu UPT Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan SK Mentan Nomor 5398/Kpts/KP.330/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Balittas mempunyai mandat penelitian dan pengembangan tanaman yang dikelompokkan sebagai komoditas perkebunan, yaitu tanaman serat, yang terdiri atas serat buah (kapas dan kapuk), serat batang (kenaf, yute, rami, rosela, linum, abaka), dan serat daun (sisal dan mendong) dengan total seluruhnya terdapat 37 varietas unggul; pemanis dengan jumlah 40 varietas unggul (tebu, stevia, dan bit gula); tembakau dengan 31 varietas unggul; dan minyak industri dengan jumlah 18 varietas unggul (jarak kepyar, jarak pagar, wijen, bunga matahari, dan kemiri minyak).

Fungsi Balittas sebagai lembaga penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri adalah melaksanakan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan, dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri; melaksanakan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, dan fitopatologi tanaman pemanis, serat,

tembakau, dan minyak industri; melaksanakan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri; melaksanakan penelitian penanganan hasil tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri; memberikan pelayanan teknik penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri; menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri; melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sampai dengan tahun 2015 Balittas telah menghasilkan lebih dari 70 varietas unggul, yang telah dilengkapi dengan paket budi daya yang efisien dan ramah lingkungan. Balittas juga menyediakan layanan jasa berupa Layanan Konsultasi Teknologi, Penyediaan Benih Sumber, Pengujian Laboratorium, dan Perpustakaan.

1. Profil Singkat Paparan

- Balittas memiliki kontribusi menghasilkan varietas tebu, tembakau, kapas, dan serat lainnya;
- Balitbang memiliki 64 UPT seluruh Indonesia (paling banyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi);
- Anggaran Balitbang diantaranya digunakan untuk Maintenance sekitar (hampir) 1 Triliun dan sekitar 800 Miliar digunakan untuk gaji pegawai;
- Badan Penelitian Pertanian Kementerian Pertanian mengakui jika anggaran yang dialokasikan sangat tinggi tetapi *output* yang dihasilkan tidak maksimal;
- Hasil royalti dari temuan/paten dari Balitbangtan rata-rata setiap tahunnya 9 Miliar; dan
- Balitbangtan memiliki jumlah doktor sekitar 560 orang dan profesor sekitar 200 orang. Dengan tingginya jumlah peneliti yang dimiliki, Negara perlu memberdayakan doktor dan profesor tersebut untuk membangun pertanian Indonesia.

2. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- Komisi IV DPR RI menilai Balittas menjadi sangat strategis karena dapat menghasilkan komoditas bernilai ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- Komisi IV DPR RI mendukung Balittas untuk dapat terkoneksi dengan industri-industri nasional, sehingga dapat menghasilkan produk pertanian berdaya saing;
- Komisi IV DPR RI mendukung agar Balittas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi perkembangan pertanian nasional;
- Komisi IV DPR RI mendukung agar negara melindungi keanekaragaman hayati dan plasma nutfah yang telah dicuri oleh peneliti asing dengan menerbitkan perundang-undangan yang terkait dengan keanekaragaman hayati;
- Negara tidak memiliki data konkrit tentang keanekaragaman hayati nasional (nama, jumlah, jenis, dll.);
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar seluruh penelitian/temuan/paten, disampaikan kepada publik;
- Komisi IV DPR RI akan menguatkan posisi Balitbangtan dengan mendukung penguatan anggaran dan perluasan infrastruktur Balitbangtan;
- Komisi IV DPR RI akan membahas dalam rapat kerja terkait hasil kajian anak bangsa agar mampu diproduksi dan tidak bergantung pada produk impor; dan
- Komisi IV DPR RI mendukung agar dalam Prolegnas memasukkan RUU Perlindungan SDG (Sumber Daya Genetik).

C. GBB PERUM BULOG SUBDIVRE MALANG

Kegiatan bidang usaha yang dilakukan oleh Perum Bulog terbagi menjadi dua kategori besar yaitu Kegiatan Pelayanan Publik dan Kegiatan Komersial. Untuk pelayanan publik, Perum BULOG mendapat penugasan Pelayanan Publik (PP) atau *Public Service Obligation* (PSO) dari Pemerintah berupa stabilisasi harga dan pasokan berbagai komoditas pangan utama terintegrasi dari sisi hulu hingga ke hilir di seluruh wilayah Indonesia.

Komoditas penugasan pelayanan publik yang ditangani Perum BULOG, antara lain, beras, gula pasir, daging sapi dan kerbau, jagung pakan ternak, dan serta kedelai. Bentuk kegiatan penugasan dimulai dari pembelian komoditas di tingkat produsen sampai ke penyalurannya melalui berbagai

kegiatan, seperti Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Keseluruhan penugasan tersebut pada prinsipnya mendukung tiga pilar dari Ketahanan Pangan yaitu: pilar ketersediaan, pilar keterjangkauan, dan pilar stabilitas.

Pengadaan dilakukan oleh Perum BULOG guna menjaga stok CBP adalah sebesar 1 s.d. 1,5 juta ton. Pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penjualan sehingga stok terjaga pada rentang yang diamanatkan Pemerintah, sehingga realisasi pengadaan tergantung pada kebutuhan penjualan. Adapun kendala pengadaan:

- Permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemic Covid-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas.
- Periode panen yang mundur dan tidak seragam antar daerah sehingga harga terjaga pada tingkat yang tinggi, beras dengan harga HPP menjadi sulit didapat.

Tahun 2020, Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengadaan beras dengan total realisasi sebesar 157.524 ton (setara beras) atau sekitar 75,41% dari total target Tahun 2020. Sedangkan untuk Tahun 2021, target yang diharapkan dalam 1 tahun yaitu 331.000 ton (setara beras) dan realisasi pengadaan per Januari-Februari hanya 5.300 ton (setara beras) atau sekitar 0,14% dari total target Tahun 2021. Direncanakan, pengadaan di Kanwil Jatim akan difokuskan pada bulan Maret dan April atau pada periode panen raya dalam bentuk Gabah Kering Giling (untuk pengadaan PSO).

Perum BULOG dengan kantor wilayah Jawa Timur memiliki posisi persediaan beras CBP per 31 Desember 2020 adalah sebesar 214.249 ton dan per 9 Februari 2021 sebesar 208.487 ton.

1. Profil Singkat Paparan Bulog

- Tahun 2020, Perum Bulog menargetkan pengadaan dalam negeri sebesar 1,4 juta ton (setara beras) namun realisasinya hanya 89,75% atau 1,25 juta ton (setara beras);
- Kendala pengadaan dalam negeri tidak mencapai 100% karena penyaluran (hilirnya) kurang luas sehingga penyerapan beras dibatasi;
- Akhir Tahun 2020, Perum BULOG memiliki stok 980 ribu ton;

- Tahun 2021, Perum BULOG menargetkan pengadaan dalam negeri sebesar 1,8 juta ton (setara beras) dan hingga saat ini baru 1 % atau 19,7 ribu ton;
- Perum BULOG akan mulai menggenjot penyerapan beras petani pada awal Maret-Mei 2021 (musim panen raya);
- Jawa Timur memiliki 13 kantor cabang dan Bondowoso paling besar penyerapannya;
- Perum Bulog meminta dukungan Komisi IV DPR RI terhadap pengadaan dan penyaluran beras petani khususnya di tengah tingginya kasus bencana alam;
- CBP Perum BULOG juga terdapat beras impor tahun 2018 dan CBP akan dikeluarkan jika ada perintah penugasan dari Pemerintah. Perum BULOG meminta dukungan Komisi IV DPR RI karena kualitas CBP akan turun mutu;
- Tidak ada bantuan Pemerintah untuk pengadaan dan biaya berasal dari dana komersil;
- Perpres 48 Tahun 2016 menyatakan bahwa Perum BULOG ditugaskan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga padi, jagung, dan kedelai tetapi sampai saat ini tidak pernah mendapatkan perintah untuk pengadaan kedelai; dan
- Perum BULOG mendapatkan penugasan pengadaan daging kerbau sedangkan daging sapi ditugaskan kepada BUMN lainnya. Perum BULOG berkomitmen dalam menyetabilkan harga daging yang wilayahnya terbuka dengan daging kerbau.

2. Profil Singkat Paparan PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PT Petrokimia Gresik)

- Akhir Tahun 2020 dan awal Tahun 2021 merupakan tantangan bagi PT PIHC dimana terdapat perubahan HET pupuk bersubsidi, perubahan komposisi produk NPK, perubahan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi (sebagian menggunakan kartu tani), serta adanya POC (pupuk organik cair) yang akan dipersiapkan dan diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik;

- Serapan pupuk bersubsidi tahun lalu, sebagian besar sudah terserap tetapi masih perlu adanya dukungan penyerapan pupuk organik. Pupuk organik dalam hal serapan, masih jauh dari pupuk lainnya;
- Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi yang sangat besar yaitu 25% dari total alokasi nasional (alokasi pupuk bersubsidi yaitu 2,28 juta, hampir sama tahun lalu);
- Stok pupuk bersubsidi untuk Provinsi Jawa Timur 350 ribu ton, lebih tinggi daripada ketentuan yaitu sekitar 105 ribu ton;
- Malang, alokasi pupuk Tahun 2021 sebesar 182 ribu ton atau 8% dari alokasi Provinsi Jawa Timur;
- Perum BULOG sudah diminta Kementerian BUMN untuk melakukan kajian terkait dengan badan pangan dengan berbagai alternatif; dan
- Perum BULOG meminta dukungan dan arahan dari Komisi IV DPR RI terhadap perkembangan Perum BULOG ke depan.

3. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- Kasus bencana alam Nasional akan mempengaruhi produksi petani Nasional sehingga perlu adanya mitigasi resiko dalam memproduksi pangan lokal;
- Kebutuhan pupuk selalu menjadi masalah dan menjadi tantangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Badan Pangan menjadi solusi dan eksekusi permasalahan pangan nasional namun hingga saat ini pembentukan badan pangan tidak bisa diwujudkan. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan sesuai dengan UU Pangan;
- Perlu ada kehadiran negara agar harga pangan (kedelai) tidak mengalami kenaikan;
- Perum BULOG perlu menyakinkan kepada masyarakat bahwa beras yang diproduksi oleh Perum BULOG memiliki kualitas yang baik dan tidak berkutu;
- Komisi IV DPR RI mendukung bantuan pemerintah tidak dilepas ke pasar tetapi ditangani kembali oleh Perum BULOG; dan
- Perum BULOG memiliki posisi yang sangat strategis mengamankan dan menyetabilkan pangan Nasional namun tanggung jawabnya di

berbagai Kementerian. Komisi IV DPR RI diharapkan untuk menyampaikan permasalahan Perum BULOG kepada Badan Legislasi yang saat ini membahas RUU Badan Pangan.

D. BANK SAMPAH KOTA MALANG

Program bank sampah adalah program yang mengajak masyarakat untuk memilah sampah organik dan nonorganik untuk ditukarkan menggunakan uang pada bank-bank sampah yang telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Di sisi lain ada juga bank sampah yang menerapkan penukaran sampah untuk pembayaran listrik, pembelian sembako, pembayaran biaya kesehatan, dan mendapatkan emas. Hal ini tentunya akan merubah pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan limbah, menjaga lingkungan dan mendapatkan pendapatan keluarga.

Berdasarkan catatan bank sampah tumbuh pesat dari tahun ke tahun, misal pada 2016 sebanyak 4.280 unit dan tahun 2017 mencapai 5.244 unit di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menjadi penting di masa pandemi, mengingat bank sampah merupakan gerakan padat karya yang bersifat partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga.

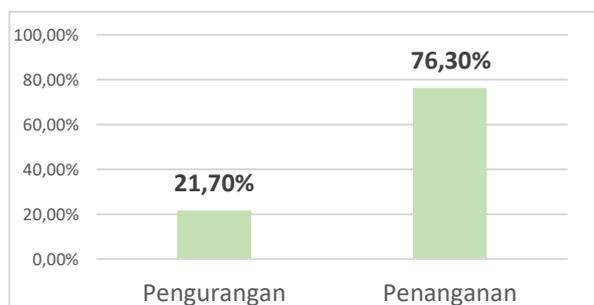
1. Profil Singkat



- Luas Wilayah: 110,06 km².
- Terbagi dalam: 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 550 RW, dan 4226 RT.
- Jumlah Penduduk Tahun 2019 sebanyak 1.117.444 jiwa.

d. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Malang Tahun 2019 adalah 98%.

e. Timbulan Sampah Harian: 789,76 ton/hari



(Sumber: Laporan Capaian Jakstrada Kota Malang Tahun 2019).

- f. TPA Kota Malang (TPA Supiturang) masih dioperasikan melalui metode pembuangan terbuka (*open dumping*) berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian Adipura Tahun 2019.
- g. Mekanisme Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang:
- 1) Anggota unit BSM/Kelompok mengumpulkan dan memilah sampah dari rumah tangga.
 - 2) Sampah yang sudah dipilah oleh anggota unit BSM disetorkan dan ditimbang ke Pengurus Unit BSM 1 s.d. 2 minggu sekali ke tempat yang ditentukan.
 - 3) Sampah yang dikumpulkan oleh Pengurus Unit BSM diambil dan ditimbang oleh Petugas BSM pada waktu yang telah ditetapkan dan diberikan Nota Penimbangan.
 - 4) Petugas BSM akan membawa ke Gudang BSM dan dipilah, dipacking, dan ditimbang oleh petugas Gudang serta dimasukkan ke stok gudang. Nota penimbangan dari pengurus unit BSM diserahkan ke teller untuk dinilai rupiahnya dan dimasukkan ke Buku Tabungan Unit BSM.
- h. Pasar dan Mekanisme Nasabah unit BSM



i. Kondisi Eksisting Bank Sampah Malang

NASABAH	JUMLAH SAMPAH YANG TEROLAH	OMSET BULANAN
<ul style="list-style-type: none">• 551 Unit BSM Masyarakat• 243 Unit BSM Sekolah• 77 Unit Instansi• 109 nasabah individu• 25 pelapak/pegepul <p>Total 24.000 orang</p>	<ul style="list-style-type: none">• 3,5 ton sampah/hari dari nasabah perorangan• 0,5 ton sampah dari pelapak/pegepul <p>Total perhari 4 ton</p>	<ul style="list-style-type: none">• Total transaksi Rp 300 juta/bulan, dengan rata-rata Rp 8 juta/hari• Total keuntungan Rp 50-60 juta/bulan <p>Omset rata-rata per tahun mencapai 2M</p>

j. Pola Kemitraan Bank Sampah

1) Pemerintah Pusat dan Daerah

- Pembangunan, perawatan, renovasi fasilitas pengolahan sampah TPS 3R.
- Pendanaan dan pendampingan.
- Sosialisasi dan Pelatihan.
- Hibah barang atau pinjam pakai sarana.

2) Kelurahan/Organisasi Sosial Kemasyarakatan

- Kelurahan/Desa yang didampingi oleh SKPD terkait memfasilitasi Pembentukan KSM dan Fasilitas Konflik/Pengaduan Masyarakat.
- Menarik luran Sampah dari rumah tangga kerjasama dengan Kelurahan/Desa atau RW/RT setempat.
- Sosialisasi dan pelatihan masyarakat melalui PKK, arisan, pengajian dan kegiatan sosial (RW/RT, Dasa Wisma, Posyandu, Karang Taruna, Pondok Pesantren, dll).

3) CSR Swasta

- Hibah barang dan sarana-prasana.
- Pendanaan.
- Kegiatan pengembangan pengolah sampah (Mesin Cacah, Mesin Pengering, dll).
- Program pemberdayaan masyarakat.

4) Swasta (Bisnis)

- Jual beli sampah terpilah.

- Barter sampah.
- Pembelian mesin pengolah sampah.
- Tukar menukar informasi pengelolaan sampah.

5) Sekolah/Perguruan Tinggi

- Edukasi dan praktik di sekolah/PT.
- Sosialisasi & pelatihan.
- Program KNN.
- Penelitian dan pengembangan teknologi pengolah sampah.

k. Pola Kemitraan Bank Sampah

No	Program	Definisi
1	Tabungan Reguler	Dapat diambil sewaktu-waktu
2	Tabungan Pendidikan	Diambil saat tahun ajaran baru/keperluan sekolah
3	Tabungan Lebaran	Diambil menjelang lebaran
4	Tabungan Sembako	Diambil dalam bentuk sembako
5	Tabungan Kepedulian Sosial	Diambil untuk sumbangan beasiswa, sumbangan, infak, sodaqoh, dll
6	Tabungan Lingkungan	Diambil untuk biaya pengelolaan lingkungan kelompok binaan
7	Tabungan Asuransi Kesehatan	Membayar sampah untuk layanan kesehatan gratis dan membayar asuransi kesehatan
8	Lomba Kampung Bersinar	Kerjasama dengan DKP Kota Malang
9	Rintisan Kampung Zero Waste	Kerjasama dengan DKP Kota Malang
10	Pinjam uang nyicil sampah	

l. Inovasi Bank Sampah Malang

- Menerima 70 jenis sampah terpilah.
- Transaksi Bank Sampah secara online untuk pembayaran listrik, air, telepon, pulsa, sembako.
- Pengembangan jaringan bisnis sampah nasional dengan kerja sama ke supplier, pabrik, industri daur ulang.

m. Penghargaan yang diperoleh Bank Sampah Malang

- Tahun 2012 penghargaan nasional dalam pengembangan Bank Sampah Induk.
- Tahun 2013 penghargaan dari Bappenas pada acara AMPL award untuk terobosan manajemen Bank Sampah.
- Tahun 2013-2014 penghargaan inovasi pengelolaan sampah. Kota Malang mendapat Adipura Kencana.

- Tahun 2014 penghargaan JIPI Jawa Pos Protonomi pada kategori pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Tahun 2014 mewakili Indonesia bersama 27 negara Asia Pacific oleh APO studi pengolahan sampah di Jepang.
- Tahun 2017 penghargaan dari KLHK untuk Bank Sampah Terbaik

2. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a. Perlu dibuka program magang pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Malang oleh masyarakat di luar Kota Malang dalam bentuk training/edukasi pengelolaan 70 jenis sampah termasuk mekanisme kelembagaan bisnisnya dengan pendekatan moral, agama, batin, serta pemasaran produk hasil kerajinan agar tercipta kesadaran secara mandiri oleh setiap warga.
- b. Perlu adanya duplikasi sistem pengelolaan sampah Kota Malang ke daerah-daerah lain melalui lomba yang diadakan oleh dinas terkait secara kontinue, misalnya 3 kali dalam setahun guna menarik peminat masyarakat untuk menghasilkan pendapatan ekonomi.

E. POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, dimana memiliki potensi produksi perikanan sebesar 26,46 juta ton, jumlah pulau sebanyak 17.508, dan luas perairan 5,8 juta km².

Oleh karena itu, tentunya potensi tersebut harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan dan dilestarikan sebaik-baiknya karena negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran SDM yang kompeten, handal, dan profesional menjadi target dan sasaran prioritas pembangunan nasional demi perbaikan sistem pendidikan vokasi dan pengembangan kelembagaan yang dibutuhkan oleh instansi/pengusaha. Selain itu, pendidikan dengan pendekatan *teaching factory*, peserta didik tidak hanya ditempa untuk memiliki keterampilan dan sikap kerja yang bagus, namun juga dibekali aspek IPTEK yang kuat.

1. Profil Singkat

- Visi: Menjadikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai politeknik yang berdaya saing terbaik 10 besar di Indonesia pada Tahun 2029.
- Misi:
 - a) Meningkatkan pendidikan dosen setara S3 sebanyak 50% pada tahun 2024.
 - b) Meningkatkan dosen dengan jabatan lektor kepala sebanyak 75% pada tahun 2024.
 - c) Meningkatkan jumlah dosen dengan bidang yang sesuai/linier dengan program studi sebesar 100% pada tahun 2024.
 - d) Menjadikan akreditasi seluruh Program Studi dengan predikat A pada tahun 2022.
 - e) Menjadikan akreditasi institusi dengan predikat A pada tahun 2024.
 - f) Meningkatkan jumlah taruna/mahasiswa asing sebanyak 5% pada tahun 2024.
 - g) Meningkatkan peran serta taruna/mahasiswa dalam event nasional dan internasional.
 - h) Meningkatkan kinerja penelitian terapan dengan adanya artikel ilmiah dalam publikasi nasional terakreditasi dan internasional bereputasi terindeks scopus sebanyak 6 publikasi untuk setiap dosen sampai tahun 2029.
 - i) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil-hasil penelitian terapan sebanyak 6 paket per tahun
 - j) Meningkatkan bimbingan teknis kepada masyarakat sebanyak 10 paket untuk 5 (lima) program s tudi setiap tahunnya.
 - k) Lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo terserap 90% di dunia Industri/Usaha pada tahun 2024.
 - l) Menyusun sistem administrasi sesuai standar manajemen mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2018.
 - m) Menjalankan kebijakan dan tugas-tugas Menteri Kelautan dan Perikanan, Badan Riset, dan SDM Kelautan dan Perikanan.

- n) Membangun kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan semua stakeholder dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Tujuan:
 - a) menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan profesionalitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di bidang kelautan dan perikanan, serta berdaya saing tinggi di pasar global;
 - b) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c) membangun jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika yang dapat menumbuh kembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan;
 - d) mewujudkan sistem penjaminan mutu internal untuk menghasilkan lulusan berkualitas dan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
 - e) memperluas kesempatan belajar bagi pelaku utama berazaskan pemerataan dan keadilan;
 - f) mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, stakeholder, dan pemerintah daerah.
 - Program Studi:
 - a) Teknik Budidaya Perikanan.
 - b) Teknik Pengolahan Produk Perikanan.
 - c) Agribisnis Perikanan.
 - d) Mekanisasi Perikanan.
 - e) Teknik Penanganan Patologi Perikanan.
 - Lulusan bersertifikat
 - a) MPM dan CBIB (TBP).
 - b) HACCP dan SPI (TPPP).
 - c) Entrepreneurship (AGP).
 - d) Ahli Manajemen Kesehatan Ikan (TPPI).
 - e) *Engine Tune Up* Konvensional (MP).

f) Sertifikasi BNSP.

g) ISO9001: 2015.

- Animo masyarakat yang masuk ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Tahun	Animo Masyarakat	Jumlah Diterima	Alokasi Masyarakat Kab. Sidoarjo	Alokasi Masyarakat Jawa Timur	Anak Perikanan Yang Tidak Mampu	Rencana Peningkatan Kapasitas
2015	678	136 (20 %)	10 (7 %)	68 (50 %)	40 %	436 orang
2016	894	140 (16 %)	14 (10 %)	70 (50 %)	40 %	436 orang
2017	708	141 (20 %)	21 (15 %)	71 (50 %)	46 %	436 orang
2018	1.258	158 (13 %)	24 (15 %)	79 (50 %)	48 %	436 orang
2019	1.368	154 (11 %)	31 (20 %)	77 (50 %)	50 %	451 orang
2020	1.500	158 (11 %)	32 (20 %)	79 (50 %)	50 %	486 orang

- Rencana peningkatan dan pengembangan jenjang pendidikan vokasi

PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN
Teknik Pengolahan Produk Perikanan	Menjadi Diploma IV	2020
Agribisnis Perikanan (AGP)	menjadi Diploma IV	2020
Teknik Budidaya Perikanan (TBP)	menjadi Diploma IV	Mulai 2021
Teknik Penanganan Patologi Perikanan	Menjadi Diploma IV	Mulai 2021
Mekanisasi Perikanan (MP)	menjadi Diploma IV	Mulai 2021
Rintisan program pasca sarjana (s2) terapan		Mulai 2022
Rintisan program studi kelautan (bioteknologi kelautan)		Mulai 2023
Diploma i program studi teknik penangkapan ikan & Diploma i program studi budidaya ikan		Mulai 2020

- Rencana Pengembangan Kampus II Pulokerto Kab. Pasuruan



- Pengembangan Unit Pembenuhan Ikan Dan Udang Paciran



2. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- Komisi IV DPR RI mengapresiasi hasil kegiatan taruna-taruni di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang telah menciptakan berbagai produk yang produktif dan kreatif dengan bahan baku yang lebih sederhana dan murah, seperti kincir air hemat energi “model stick 1 phase”, bioflok dengan teknologi generator mikroable, *thermoelectric coolbox*, lemari pengasap ikan berbahan bakar bricket, *autofeeder*.
- Komisi IV DPR RI mendorong produk hasil karya Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dapat diproduksi secara masal dan dijadikan sebagai program bantuan Pemerintah APBN-P 2021 atau pada tahun 2022 dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam rekrutmen peserta didiknya dapat mengakomodir sebanyak 75% yang berasal dari Jawa Timur.

F. BALAI KARANTINA PERTANIAN BANDARA JUANDA SIDOARJO

Penyelenggaraan karantina pertanian ditujukan untuk:

- a. mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mencegah tersebarnya HPHK serta OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mencegah keluarnya HPHK serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
- e. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
- f. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. BBKP Surabaya, merupakan garda depan pertanian untuk melindungi kelangsungan sumber daya hayati hewani dan nabati. Keberadaan karantina yang strategis mutlak diperlukan karena negara Indonesia merupakan negara agraris dan kepulauan.

1. Profil Singkat Paparan

- Seluruh sertifikasi karantina pertanian telah dilakukan secara *online* dan tidak ada pembayaran *cash money*;
- Karantina memiliki target sertifikasi produk pertanian 1 juta dalam 1 tahun. Tahun 2020 dengan anggaran yang dipotong, Badan Karantina telah mengeluarkan 400 lebih sertifikasi produk pertanian; dan
- Tahun 2021, Badan Karantina akan memasang 10 unit Xray di kantor Bandara salah satunya Bandara Juanda Provinsi Jawa Timur.

2. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Karantina Pertanian di Bandara Juanda yang telah memperbaiki sistem dan manajemennya sehingga pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikasi produk pertanian menjadi lebih dipermudah.

G. BALAI KARANTINA PERIKANAN BANDARA JUANDA SIDOARJO

Perkembangan zaman yang sangat cepat dan dinamis menjadikan meningkatnya volume dan arus perdagangan di Indonesia, dan meningkatnya variasi jenis hama dan penyakit ikan hingga isu *bio-security* dan bio-terorisme. Potensi pemanfaatan sumber daya hayati ikan Indonesia yang besar tersebut, baik antarnegara maupun antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, berpotensi terhadap meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), sehingga dapat mengancam kelestarian sumber daya hayati ikan Indonesia.

Pembangunan karantina ikan merupakan bagian integral dari pembangunan kelautan perikanan yang merupakan penggerak dan pilar

pembangunan ekonomi nasional yang komprehensif, prospektif, dan kompatibel. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dan efektif guna melindungi keanekaragaman spesies endemik lokal Indonesia, mengingat Karantina berperan penting dalam mencegah masuk, keluar, dan berkembangnya hama penyakit ke dan dari wilayah Indonesia, serta mencegah keluarnya sumber daya hayati asli Indonesia secara illegal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

1. Profil Singkat

- Tujuan penyelenggaraan karantina ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yakni:
 - a) Mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri, antararea dalam negeri dan keluar dari wilayah NKRI.
 - b) Pengawasan dan pengendalian masuk/keluarannya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu.
 - c) Pengawasan dan pengendalian masuk/tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan.
 - d) Pengawasan dan pengendalian keluar/masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta SDG dari wilayah NKRI atau antar area di dalam negeri yang tidak sesuai ketentuan perundangan.
- Wilayah kerja Balai Karantina Ikan Surabaya I yakni:
 - a) Wilker Bandara Juanda Sidoarjo.
 - b) Wilker Malang.
 - c) Wilker Jember.
 - d) Wilker Banyuwangi.
- Pelayanan Standar Internasional



- Data ekspor yang berasal dari Balai Karantina Ikan Surabaya I



- Jenis Komoditas ekspor ikan yang berasal dari Balai Karantina Ikan Surabaya I



- Jenis Komoditas impor ikan yang masuk ke Balai Karantina Ikan Surabaya I



- Capaian PNBP di Balai Karantina Ikan Surabaya I tahun 2018-2020 yaitu:
 - Tahun 2018 sebanyak Rp8,87 miliar.
 - Tahun 2019 sebanyak Rp8,31 miliar.
 - Tahun 2020 sebanyak Rp8,24 miliar
- Penanganan kasus di Balai Karantina Ikan Surabaya I tahun 2018-2020 yaitu:



- Balai Karantina Ikan Surabaya I telah menerapkan X-ray dengan teknologi terbaru dalam rangka peningkatan kompetensi pemeriksaan lalu lintas ikan dan hasil perikanan personil bekerja sama dengan PT Angkasa Pura Logistik dan PT GATRANS yang berlokasi di lini 1 terminal kargo Bandara Juanda dan di PT Ghita Avia Trans.



2. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan hasil Perikanan di Bandara Juanda yang telah meningkatkan sistem dan manajemen mutu serta proses perizinannya sehingga masyarakat yang akan mengurus sertifikasi produk hasil perikanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif.

III. KESIMPULAN

1. Sektor Pangan dan Pertanian

- a) Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan anggaran untuk pengembangan Politeknik Pembangunan Pertanian seluruh Indonesia;
- b) Komisi IV DPR RI mendukung Politeknik Pembangunan Pertanian untuk tetap menjadi aset Kementerian Pertanian dan tidak beralih ke Kementerian lainnya;
- c) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar seluruh penelitian/temuan/paten, disampaikan kepada publik;
- d) Komisi IV DPR RI mendukung agar dalam Prolegnas memasukkan RUU Perlindungan SDG (Sumber Daya Genetik) dan Keanekaragaman Hayati;
- e) Komisi IV DPR RI mendukung bantuan pemerintah tidak dilepas ke pasar tetapi ditangani kembali oleh Perum BULOG;
- f) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan sesuai dengan UU Pangan; dan

- g) Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Karantina Pertanian di Bandara Juanda yang telah memperbaiki sistem dan manajemennya sehingga pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikasi produk pertanian menjadi lebih dipermudah.
2. Sektor Lingkungan Hidup dan kehutanan
- a) Perlu dibuka program magang pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Malang oleh masyarakat di luar Kota Malang dalam bentuk training/edukasi pengelolaan 70 jenis sampah termasuk mekanisme kelembagaan bisnisnya dengan pendekatan moral, agama, batin, serta pemasaran produk hasil kerajinan agar tercipta kesadaran secara mandiri oleh setiap warga.
 - b) Perlu adanya duplikasi sistem pengelolaan sampah Kota Malang ke daerah-daerah lain melalui lomba yang diadakan oleh dinas terkait secara kontinue, misalnya 3 kali dalam setahun guna menarik peminat masyarakat untuk menghasilkan pendapatan ekonomi.
3. Sektor Kelautan dan Perikanan
- a) Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan di Bandara Juanda yang telah meningkatkan sistem dan manajemen mutu serta proses perizinannya sehingga masyarakat yang akan mengurus sertifikasi produk hasil perikanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif.
 - b) Komisi IV DPR RI mendukung hasil riset kegiatan taruna-taruni di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang telah menciptakan berbagai produk yang produktif dan kreatif dengan bahan baku yang lebih sederhana dan murah, seperti kincir air hemat energi “model stick 1 phase”, bioflok dengan teknologi *creator microbubble*, *thermoelectric coolbox*, Kristalida, Sukmarula, lemari pengasap ikan berbahan bakar bricket, *autofeeder*, bandeng cabut duri dan olahan lain, serta hasil diversifikasi ikan berupa ekado, kripik kulit ikan patin, nugget ikan bakso ikan, mietimi, hingga sirup mangrove.
 - c) Komisi IV DPR RI mendorong produk hasil karya Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dapat diproduksi secara masal dan dijadikan sebagai program bantuan pemerintah APBN-P 2021 atau pada tahun 2022 dalam

rangka untuk kemaslahatan dan penyaluran ke masyarakat secara luas terutama melalui wakil rakyat di dapil masing-masing.

- d) Komisi IV DPR RI meminta kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam rekrutmen peserta didiknya dapat mengakomodir sebanyak 75% yang berasal dari Jawa Timur guna mencetak SDM yang kompeten dari generasi muda dan wirausahawan handal.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang didapatkan dari hasil kunker, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021

Ketua Tim

Anggia Erma Rini, M.K.M.
A-41

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang



Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)



Gudang Bulog Subdivre Malang



Bank Sampah Kota Malang



Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo



Kantor Karantina Pertanian Bandara Juanda Sidoarjo



Kantor Karantina Perikanan Sidoarjo



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

1. <https://kumparan.com/tugumalang/komisi-iv-dpr-ri-minta-anggaran-pendidikan-polbangtan-malang-dinaikkan-1vBMzr54Mg>
2. <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/polbangtan-malang-diharap-lahirkan-petani-modern-dari-generasi-milenial/>
3. <https://www.jpnn.com/news/dpr-kunjungi-polbangtan-malang-kementan-paparkan-fokus-regenerasi-pertanian>
4. <https://sekilasmedia.com/2021/02/17/komisi-iv-dpr-ri-laksanakan-kunjungan-kerja-di-polbangtan-malang/>
5. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/327817/kunjungi-polbangtan-malang-komisi-iv-dpr-ri-singgung-soal-regenerasi-pertanian>
6. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/327844/komisi-iv-dpr-ri-janji-perjuangkan-anggaran-untuk-polbangtan>
7. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/328267/sekretaris-badan-ppsdmp-dampingin-kunker-komisi-iv-dpr-ri-ke-jatim-ini-kegiatannya>
8. <https://www.harianaceh.co.id/2021/02/15/komitmen-kementan-regenerasi-petani-di-polbangtan/>
9. <http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/berita/kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-di-malang/>
10. <https://ekbis.sindonews.com/read/336086/34/komisi-iv-dpr-dukung-kementan-lakukan-regenerasi-petani-di-polbangtan-1613397750>

11. <https://www.suarakarya.id/detail/127896/Kunjungan-DPR-Kementan-Dorong-Regenerasi-Petani-Melalui-Polbangtan>
12. <https://koranbumn.com/2021/02/kunker-komisi-iv-dpr-ri-ke-gudang-beras-bulog/>
13. <https://koran-jakarta.com/dpr-kunjungi-politeknik-kp-sidoarjo>
14. <https://kkp.go.id/artikel/27297-dpr-ri-apresiasi-hasil-inovasi-politeknik-kp-sidoarjo>
15. <https://www.republika.co.id/berita/qomi3a327/komisi-iv-dpr-dorong-percepatan-ekspor-produk-pertanian>
16. <https://www.republika.co.id/berita/qomniq380/dpr-ri-ekspor-produk-pertanian-jatim-patut-diapresiasi>
17. <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/27325-dikunjungi-komisi-iv-bkipm-surabaya-jabarkan-peningkatan-ekspor-perikanan-2020>
18. <https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-691471473/hari-peduli-sampah-nasional-anggota-dpr-ri-momentum-kembangkan-industri-daur-ulang-terpadu>
19. <http://poltekkpsidoarjo.kkp.go.id/artikel-1161-Kunjungan-Kerja-Komisi-IV-DPR-RI.html>
20. <https://kkp.go.id/artikel/27299-dpr-ri-apresiasi-hasil-inovasi-politeknik-kp-sidoarjo>

MITRA PENDAMPING

Kementerian Pertanian	
Kepala Badan Litbang Pertanian	Dr. Ir. Fadjri Jufry, M.Si
Kepala Badan Karantina Pertanian	Ir. Ali Jamil, MS, Ph.D
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3)	Rosa Vivien Ratnawati, SH, M.Sc
Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Kepala BRSDMKP	Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA
Perum Bulog	
Direktur Human Capital	Sinar Hadi Purnomo
Pupuk Indonesia Holding Company	
Direktur Operasi dan Produksi (PT Petrokimia Gresik)	Digna Jatningsih
Direktur Keuangan dan Umum (PT Pupuk Kaltim)	Qomaruzzaman